

**IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH :

SUPRAPTONO

301201010067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2024

IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

Oleh : Suprptono

Pembimbing I : Dr. Wandu S.H M.H , Pembimbing II : Muhsin S.H,M.H

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca darurat karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanggulangan yang berbeda.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi peran dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. (2) Apa yang menjadikan hambatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan peran dan fungsi nya dalam proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi empiris, dimana pendekatan sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dan penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan (1) Bagaimana implementasi peran dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Implementasi peran dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD melakukan mitigasi bencana kebakaran dengan berkoordinasi bersama lembaga pemerintah dan juga masyarakat maupun pelaku usaha dimana hal ini untuk mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan, (2) hambatan dalam proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir adalah kurangnya personil TRC dan BPBD, banyak perusahaan

yang tidak memiliki izin membuka lahan dengan cara membakar, keterbatasan alat dan kesadaran masyarakat masih kurang

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Kerangka Konseptual	10
G. Metode Penelitian	15

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Peran	26
C. Tinjauan Umum Tentang Fungsi.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan	47

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Dan Fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	64
B. Hambatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Melaksanakan Peran Dan Fungsi nya Dalam Proses Penanggulangan Bencana Kebakaran	

Hutan Dan Lahan	87
-----------------------	----

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
----------------------------	------------